

**POLEMIK PEMBERITAAN HASIL TES WAWASAN KEBANGSAAN YANG MENONAKTIFKAN 75 PEGAWAI KPK (ANALISIS FRAMING PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN ANTARANEWS.COM)**

***THE POLEMIC OF REPORTING THE RESULTS OF THE NATIONAL INSIGHT TEST THAT DISABLED 75 KPK EMPLOYEES (FRAMING ANALYSIS ON KOMPAS.COM AND ANTARANEWS.COM ONLINE MEDIA)***

**Yulia Rahmawati<sup>1</sup>, Yenrizal<sup>2</sup>, Ahmad Muhaimin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Indonesia

<sup>1</sup>[1710701041@radenfatah.ac.id](mailto:1710701041@radenfatah.ac.id)

<sup>2</sup>[yenrizal\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:yenrizal_uin@radenfatah.ac.id)

<sup>3</sup>[ahmadmuhaimin\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ahmadmuhaimin_uin@radenfatah.ac.id)

**ABSTRACT**

*On May 6, 2021, the announcement of the Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) results for employees of the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) generated mixed reactions in the community, as 75 employees of the anti-corruption institution were declared not to have passed the TWK. Several prominent figures were holding large mattresses among the 75 names of employees who did not pass. This study examines two Indonesian online news portals, Kompas.com and Antaranews.com. This study aims to examine how the media frames and compares the results of the TWK of KPK employees. This study takes a qualitative approach, collecting data through observation and conducting a literature review using Robert N. Entman's framing analysis model. The purpose of this research is to write a news article about the controversy surrounding the TWK results for KPK employees for the period June 17–18, 2021. The findings of this study demonstrate that there are differences in how the online news portals Kompas.com and Antaranews.com frame the news regarding the polemics surrounding the National Insight Test results for KPK employees. Kompas.com frequently frames news negatively, implying that the KPK will manipulate and wash their hands of the TWK case. Meanwhile, Antaranews.com developed the framing as KPK clarification news, i.e., a guarantee regarding the originator of the TWK concept.*

*Keywords: Framing Analysis, TWK KPK staff, Kompas.com and Antaranews.com*

**ABSTRAK**

Pengumuman Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diumumkan pada 6 Mei 2021 menimbulkan pro kontra di masyarakat, karena ada 75 pegawai lembaga anti korupsi tersebut yang dinyatakan tidak lulus TWK. Dalam 75 nama pegawai yang tidak lulus tersebut ada beberapa tokoh besar dan dianggap memegang kasus besar. Penelitian ini mengacu pada dua portal berita online di Indonesia, yaitu Kompas.com dan Antaranews.com. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana framing dan perbandingan yang dibuat media dalam memberitakan hasil TWK pegawai KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan studi pustaka dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman. Objek penelitian ini adalah artikel berita mengenai polemik hasil TWK pegawai KPK periode 17-18 Juni 2021. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa portal berita online Kompas.com dan Antaranews.com menunjukkan adanya perbedaan dalam membingkai pemberitaan mengenai polemik hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK ini. Kompas.com cenderung membingkai berita yang mengangkat isu negatif terhadap pihak KPK yang akan melakukan manipulasi dan cuci tangan dalam kasus TWK ini. Sedangkan Antaranews.com mengembangkan framingnya sebagai berita klarifikasi dari pihak KPK yaitu jaminan amengnai penggas ide TWK.

Kata Kunci : Analisis Framing, TWK Pegawai KPK, Kompas.com, Antaranews.com

## 1. PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi topik pembahasan diberbagai media usai 75 pegawainya tidak memenuhi syarat setelah mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pengalihan status dari pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Namun, 75 pegawai KPK yang dinyatakan dibebastugaskan karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan tersebut tentunya menjadi perhatian berbagai pihak dan menimbulkan pro kontra banyak pihak maupun media pemberitaan. Beberapa pihak menganggap bahwa ini bukan hanya sebatas urusan kepegawaian saja tetapi merupakan bagian dari upaya pelemahan lembaga anti korupsi tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Giri Suprapdiono Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, dalam wawancaranya yang dikutip dari laman Kompas.com dirinya menilai bahwa Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK merupakan skenario pelemahan KPK.

Jauh sebelum polemik mengenai hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK ini hangat diperbincangkan dikalangan media massa, sebelumnya juga pernah ada upaya pelemahan lembaga anti korupsi tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Peneliti *Indonesia Corruption Watch (ICW)* Kurnia Ramadhana yang dikutip dari *Tribunnews.com*, ia mengatakan bahwa upaya pelemahan KPK sudah dirancang secara runtut. Sejak 17 Oktober 2019, *East Asia Forum* melaporkan, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi yang dinilai melemahkan KPK. Adapun salah satu poin yang dianggap melemahkan kinerja KPK yaitu pembentukan dewan pengawas yang dinilai akan menutup ruang gerak KPK dalam menyelidiki kasus korupsi, penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK ini seolah sebagai upaya lanjutan pelemahan lembaga anti korupsi negara ini. (Maliana, 2021)

Banyaknya partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan dalam wujud memberi komentar menunjukkan adanya perhatian yang khusus terhadap pemberitaan mengenai polemik Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh KPK ini. Kontroversi kasus ini dilatarbelakangi karena banyaknya kejanggalan dari pelaksanaan TWK ini, 75 pegawai yang dinonaktifkan tersebut banyak diantaranya yang sedang menangani kasus korupsi besar, itulah mengapa TWK tersebut dianggap banyak pihak sebagai upaya pelemahan KPK itu sendiri, padahal presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan dalam akun youtube Sekretarian Presiden bahwa TWK tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK, tes wawasan kebangsaan ini merupakan langkah-langkah perbaikan KPK.

Isu penyingkiran 75 pegawai KPK ini ditambah lagi karena pimpinan KPK seolah menghindari dan tidak tahu soal proses Tes Wawasan Kebangsaan tersebut saat dimintai keterangan oleh Komnas HAM yang memanggil KPK atas laporan dari pegawai yang tak lolos TWK tersebut.

Sebanyak 75 orang pegawai yang dibebastugaskan karena tak lolos TWK menjadi bahan pemberitaan di media. Berita bukanlah refleksi atau distorsi realitas. Intinya bukan mengenai apakah berita tersebut mencerminkan realitas, tetapi apakah berita tersebut sesuai atau bias terhadap realitas yang digambarkannya. Karena refleksi adalah praktik penyelenggara pembuat berita itu sendiri. Dengan cara ini, berita menjadi sesuatu yang diciptakan oleh penyelenggara produser berita itu sendiri (Prawitasari, 2013).

Dalam pemberitaan mengenai polemik hasil tes Wawasan Kebangsaan yang kemudian menjadikan 75 pegawai KPK dinonaktifkan ini peneliti melihat Kompas.com dan Antaranews.com merupakan dua media yang selalu update mengenai pemberitaan ini, namun terlihat adanya perbedaan dalam penyajian berita yang dilakukan oleh Kompas.com dan Antaranews.com. Kompas.com banyak menuliskan berita yang menyatakan kontra dengan keputusan yang dianggap KPK, sedangkan Antaranews.com memberikan pandangan yang berbeda, itulah mengapa peneliti ingin mengetahui bagaimana pembingkai berita mengenai "Polemik Pemberitaan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang Menonaktifkan 75 pegawai KPK ( Analisis Framing pada Media Online Kompas.com dan Antaranews.com)" serta ingin mengkaji bagaimana kualitas kedua media online ini dalam membingkai berita (*framing*).

### 1.1. Analisis Framing Robert N. Entman

Robert N. Entman memandang sebuah framing dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu atau pemilihan realitas dan penekanan/penonjolan aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas. Framing merupakan pendekatan untuk dapat mengetahui bagaimana cara pandang ataupun perspektif yang digunakan wartawan saat menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang itulah yang menentukan fakta apa yang diambil dan bagian mana saja yang ditonjolkan serta dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. (Eriyanto, 2012)

Penggunaan konsep framing oleh Robert N. Entman ini ialah untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari sebuah realitas yang terjadi oleh sebuah media. Kemudian pada teks komunikasi yang akan ditampilkan, framing memberi tekanan lebih pada bagian mana yang akan ditonjolkan atau pada bagian yang dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan: membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh halayak.

Dan dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Secara lebih jelas, akan digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Konsep Framing Model Robert N. Entman

Pendefinisian masalah ( <i>Define problems</i> )	Bagaimana isu / suatu peristiwa itu di lihat? sebagai masalah apa? Atau sebagai apa?
Memperkirakan masalah atau sumber masalah ( <i>Diagnose causes</i> )	Apa penyebab peristiwa itu terjadi ? Apa yang dianggap sebagai suatu penyebab masalah? Siapa (actor) yang dianggap sebagai penyebab masalah
Membuat keputusan moral ( <i>Make moral judgement</i> )	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
Menekankan Penyelesaian ( <i>Treatment recommendation</i> )	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber : Eriyanto, (2012). *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologis, Dan Politik Media*. Yogyakarta: LKis

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Unit analisis ialah yaitu berita mengenai polemik hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang menonaktifkan 75 pegawai KPK pada media online Kompas.com dan Antaranews.com. Data yang digunakan yaitu pemberitaan mengenai polemik hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang menonaktifkan 75 pegawai KPK periode Juni 2021, dan peneliti menggunakan 2 artikel dari tiap media pada berita edisi 17-18 Juni 2021 yang dipublikasikan oleh Kompas.com dan Antaranews.com.

Pendekatan keilmuan dalam penelitian ini yakni ilmu komunikasi dengan menggunakan tehnik analisis *framing* Robert N. Entman. Analisis data kualitatif dimulai dari dari analisis data yang peneliti kumpulkan baik dari dokumentasi maupun studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan tehnik analisis framing Entman dengan konsepnya yaitu *Define problems* (Pendefinisian masalah), *Diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *Make moral judgement* (membuat keputusan moral), *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Hal ini relevan untuk mengkaji skema pembingkai berita Kompas.com dan

Antaraneews.com terkait berita polemik hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang menonaktifkan 75 pegawai KPK.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Analisis Framing Tentang Polemik Pemberitaan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Yang Menonaktifkan 75 Pegawai KPK Yang Dimuat Pada Media Online Kompas.com dan Antaraneews.com

Media massa dalam mengkonstruksikan realitas yaitu dengan cara memberi penekanan pada realitas atau isu yang ada. Realitas yang sama dapat menghasilkan suatu pemberitaan yang berbeda, karena adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh wartawan. Sama halnya dengan berita terkait polemik hasil TWK KPK yang dimuat oleh Kompas.com dan Antaraneews.com. Dari keseluruhan berita, peneliti mengambil 2 judul berita dari masing-masing media baik Kompas.com maupun Antaraneews.com. Artikel Kompas.com dengan judul “ Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curigai Bakal Ada Manipulasi ” dan ” Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan”. Sementara Antaraneews.com dengan judul artikel “KPK Jamin Transparan Soal TWK Selama Menjadi Wewenang Lembaga” dan “Nurul Ghufron Bantah Tidak Tahu Penggagas Ide TWK “.

Dari hasil analisis keseluruhan berita diatas, setelah dianalisis menggunakan teknik analisis framing Robert N. Entman dengan konsepnya yaitu *Define problems* (Pendefinisian masalah), *Diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumbermasalah), *Make moral judgement* (membuat keputusan moral), *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian) didapat hasil : pada pendefinisian masalah (*Define Problem*), *frame* yang dikembangkan Kompas.com dalam beritanya yaitu mengenai kecurigaan pegawai KPK akan adanya manipulasi lanjutan yang nantinya akan dilakukan oleh ketua KPK dan Kepala BKN. Hal ini didasari dari keterangan yang didapat dari salah satu pegawai KPK yang menyatakan bahwa dari awal perencanaan Tes Wawasan kebangsaan tersebut banyak manipulasi yang terjadi. Sementara *frame* yang dikembangkan oleh Antaraneews.com dalam berita ini ialah KPK yang akan menjamin transparansi persoalan hasil TWK pegawai KPK, selama hal-hal yang diminta keterangannya tersebut masih berada dalam wewenang lembaga KPK dalam kasus ini.

*Diagnose causes* dalam berita Kompas.com, pihak KPK diposisikan sebagai pelaku (aktor) sebagai penyebab masalah, karena dalam berita dinyatakan bahwa keterbukaan mengenai informasi Tes Wawasan Kebangsaan oleh KPK lambat, hal inilah yang membuat kecurigaan adanya manipulasi yang akan dilakukan. Sementara Antaraneews.com justru menyatakan bahwa beberapa hal yang terkait persoalan TWK KPK ini, seperti metode, materi dan juga hasil Tes Wawasan Kebangsaan KPK bukan wewenang KPK, melainkan otoritas tersebut berada pada BKN, dalam pemberitaan ingin menjelaskan bahwa bukan KPK tidak ingin transparan mengenai persoalan TWK ini, tetapi beberapa hal memang bukan ranah wewenang KPK.

Kemudian keputusan moral (*make moral judgement*) yang dimuat oleh Kompas.com menyatakan bahwa KPK juga sedang berusaha memenuhi permintaan salinan hasil TWK pegawai KPK. Disebutkan dalam berita bahwa pihak KPK tengah bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara untuk pemenuhan informasi tersebut. Namun dari pernyataan juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa salinan dokumen yang diminta bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK. Begitu juga dengan Antaraneews.com yang memberikan keputusan moral dalam pemberitaannya yang menyatakan bahwa atas pengaduan yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang mengadukan KPK ke beberapa lembaga, KPK akan tetap taat dan juga menghormati semua lembaga yang melakukan prosesnya.

Pada bagian penyelesaian masalah (*treatment recommendation*), baik Kompas.com maupun Antaraneews.com memberikan rekomendasi yang mengarah pada penyelesaian polemik ini, agar keputusan dan hasil dari Tes Wawasan Kebangsaan KPK ini segera diberitahukan dengan jelas. Kompas.com menuliskan rekomendasi untuk memperpanjang waktu untuk mengirimkan pembe

ritahuan sesuai dengan ketentuan dan paling lambat tujuh hari berikutnya dengan alasan tertulis dan Antaranews.com menuliskan bahwa Pimpinan KPK telah menginstruksikan agar surat keputusan diberitahukan pada 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK.

#### 4.2. Analisis Perbandingan Framing Kompas.com dan Antaranews.com

Polemik pemberitaan mengenai hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang menonaktifkan 75 pegawai KPK ini mengemuka sejak awal Mei 2021. Polemik ini ramai dibahas berbagai media pemberitaan *online* yang menimbulkan pro dan kontra, karena beberapa pihak menganggap bahwa hal tersebut dianggap sebagai cara untuk menyingkirkan pegawai yang berintegritas dalam lembaga anti korupsi tersebut.

Dalam Jurnalistik, framing dan pemberitaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab setiap peristiwa yang kemudian ditulis dalam laporan kejadian, yang paling berperan didalamnya yaitu penulis beritanya. Siapa yang akan dijadikan sebagai korban atau pahlawan dan siapa yang akan dijadikan pelaku atau penjahat itu dibentuk dari sudut pandang *framing* oleh penulis.

Tabel 2. Perbandingan Framing Antara Kompas.com dan Antaranews.com Terkait Polemik Pemberitaan TWK KPK

Elemen	Kompas.com	Antaranews.com
<b>Problem Identification</b>	Pegawai KPK curiga akan ada manipulasi yang akan dilakukan ketua KPK dan kepala BKN	KPK akan menjamin transparansi persoalan TWK selama hal tersebut masih merupakan wewenang lembaga KPK
<b>Diagnoses Causes</b>	Keterbukaan informasi mengenai TWK yang diminta oleh pegawai dinilai lambat	Terkait metode, materi dan juga hasil TWK, otoritas wewenang tersebut ada pada wewenang BKN untuk membukanya ataupun tidak membukanya.
<b>Make Judgement Moral</b>	KPK memiliki upaya untuk pemenuhan informasi hasil TWK melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara	Atas pengaduan sejumlah pihak ke beberapa instansi, KPK akan tetap taat dan menghormati semua lembaga secara procedural
<b>Treatment Recommendation</b>	Memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan dan paling lambat tujuh hari berikutnya dengan alasan tertulis	Pimpinan KPK telah menginstruksikan agar surat keputusan diberitahukan pada 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK

Sumber :Diolah oleh peneliti

Dari hasil penelitian menggunakan perangkat framing model Robert N.Entman, dapat dilihat adanya perbedaan sudut pandang antara Kompas.com dan Antaranews.com pada polemik pemberitaan hasil TWK yang menonaktifkan 75 pegawai KPK. Perbedaannya terlihat pada pendefinisian masalah, pada artikel berita Kompas.com mengangkat isu akan adanya manipulasi oleh KPK terkait hasil TWK, dan juga penilaian terhadap KPK yang terkesan cuci tangan terhadap kasus ini, hal ini seolah menunjukkan Kompas.com kontra terhadap KPK, dan yang menjadi tertuduh dalam kasus ini pada pemberitaan oleh Kompas.com ialah KPK. Sebaliknya pada Antaranews.com justru



pendefinisian masalahnya yaitu jaminan transparansi KPK mengenai Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK dan juga pembantahan tuduhan ketidaktahuan pihak KPK mengenai ide TWK, dari artikel berita yang ada pada portal berita Antaranews.com ini justru terlihat menjawab terkait berita-berita yang berpandangan negatif terhadap tindakan KPK dalam kasus ini, hal tersebut terlihat dari narasumber yang dimintai keterangan dalam berita, pada Antaranews.com ini narasumbernya dari pihak KPK sendiri yaitu wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Pemilihan narasumber dari pihak yang berbeda juga pastinya akan memberikan pengaruh terhadap sudut pandang berita. Berbeda dengan Antaranews.com yang menjadikan wakil ketua KPK sebagai narasumber dalam beritanya, Kompas.com justru menjadikan salah satu pegawai KPK yaitu Novariza yang namanya masuk dalam daftar pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan tersebut. Tentu saja dua pihak yang berbeda ini akan memberikan pandangan yang berbeda terhadap kasus ini yang menjadikan sudut pandang berita yang dibuat oleh dua portal berita tersebut tentunya berbeda.

Perbedaan lainnya dalam pengemasan berita antara Kompas.com dan Antaranews.com terlihat pada pengemasan judul berita. Kompas.com cenderung menggiring pembaca untuk kontra terhadap KPK, seperti pada judul berita pertama yang dianalisis pada penelitian ini yaitu “Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curigai Bakal Ada Manipulasi”. Sedangkan Antaranews.com dalam pengemasan judul justru berbanding terbalik dengan Kompas.com, judul yang dipakai oleh Antaranews.com pada berita pertama yang diteliti yaitu “KPK Jamin Transparan Soal TWK Selama Menjadi Wewenang Lembaga”, judul ini digunakan seolah menjadi berita klarifikasi dari pihak KPK ditengah adanya sejumlah pemberitaan yang kontra terhadap KPK, misalnya saja pada media Tempo.co, pada tanggal 13 Juni 2021 memuat pemberitaan terkait hasil polemik hasil TWK dengan judul “Sejumlah pegawai KPK Tuding Lembaganya Sembunyikan Hasil TWK”, dan pada Tribunnews.com tanggal 17 Juni 2021 memuat berita dengan judul “ICW: Kami Minta KPK Tak Sebarkan Informasi Bohong Soal TWK”.

Pada pemberitaan polemik kasus TWK KPK, peneliti melihat bahwa Kompas.com dalam pemberitaannya tidak memihak pada suatu instansi ataupun tokoh politik. Dalam pemilihan aspek tertentu Kompas.com menonjolkan isu kecurigaan terhadap KPK dan juga menilai pimpinan KPK yang cuci tangan mengenai kasus TWK ini, namun Kompas.com dalam menuliskan berita bergantung pada pernyataan narasumber atau ataupun kutipan dan juga fakta-fakta pendukung lain yang disesuaikan dengan bingkai yang ingin ditampilkan oleh media Kompas.com.

Berbeda dengan Kompas.com, Antaranews.com justru terlihat seperti memihak lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Jika dilihat dari berita yang diteliti Antaranews.com mermbuat berita dengan isi klarifikasi dan penjelasan dari pihak KPK sendiri yang membantah isu-isu negatif yang ditujukan kepada pihak KPK. Namun disini peneliti melihat bahwa Antaranews.com ingin mengambil peran sebagai media penyeimbang dalam pemberitaan yang tengah terjadi, karena saat ini banyak berkembang realitas pemberitaan yang kurang berimbang yang dapat berpotensi membuat kondisi di Indonesia semakin buruk dalam berbagai segi. Misalnya pada polemik pemberitaan hasil TWK ini, akan berdampak negatif bagi negara jika masyarakat membaca dan sepenuhnya mempercayai isu negatif yang ditujukan pada KPK, masyarakat mungkin tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap salah satu lembaga penting negara tersebut.

Dari berita yang disajikan Kompas.com terlihat isu yang diberitakan terlihat seperti suatu hal yang wajar dan memang mungkin terjadi. Secara tidak langsung, berita pada Kompas.com mewakili perspektif wartawan dalam memandang bagaimana kurangnya keterbukaan KPK dalam menyelesaikan polemik hasil Tes Wawasan Kebangsaan ini. Pada akhirnya proses konstruksi oleh Kompas.com membentuk citra KPK menjadi kurang baik dimata para pembaca berita.

Berbeda dengan Kompas.com, Antaranews.com justru terlihat seperti memihak lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Jika dilihat dari berita yang diteliti Antaranews.com mermbuat berita dengan isi klarifikasi dan penjelasan dari pihak KPK sendiri yang membantah isu-isu negatif yang ditujukan kepada pihak KPK. Namun disini peneliti melihat bahwa Antaranews.com ingin mengambil peran sebagai media penyeimbang dalam pemberitaan yang

tengah terjadi, karena saat ini banyak berkembang realitas pemberitaan yang kurang berimbang yang dapat berpotensi membuat kondisi di Indonesia semakin buruk dalam berbagai segi. Misalnya pada polemik pemberitaan hasil TWK ini, akan berdampak negatif bagi negara jika masyarakat membaca dan sepenuhnya mempercayai isu negatif yang ditujukan pada KPK, masyarakat mungkin tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap salah satu lembaga penting negara tersebut. Seperti yang kita tahu tentunya Antaranews.com ini berada dibawah dibawah naungan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, namun pada HUT Antara ke 74 Kemenkominfo Henry Subiakto menyampaikan bahwa menjamin tidak menjadikan Antara sebagai media corong pemerintah, namun meminta Antara untuk tetap Objektif dan tidak memihak untuk menunjukkan bahwa peran media Antara ialah sebagai media penyeimbang pemberitaan di negara ini.

Selain dari perbedaan yang dapat dilihat, dari kedua media tersebut juga terlihat persamaan pada bagian penyelesaian masalah, baik Kompas.com maupun Antaranews.com memberikan rekomendasi yang mengarah pada penyelesaian polemik ini, agar keputusan dan hasil dari Tes Wawasan Kebangsaan KPK ini segera diberitahukan dengan jelas.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai analisis framing polemik pemberitaan hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang menonaktifkan 75 pegawai KPK pada media online Kompas.com dan Antaranews.com dengan menggunakan metode analisis framing model Robert. N.Entman, didapat kesimpulan bahwa Kompas.com mengembangkan framing kecurigaan terhadap KPK dan isu tindakan cuci tangan atas ketidaktahuan wakil ketua KPK soal proses TWK, dimana hal ini bisa saja menggiring pembaca untuk berpandangan negatif terhadap KPK. Sementara Antaranews.com justru mengembangkan framingnya sebagai berita klarifikasi dari pihak KPK yaitu jaminan ketransparansian soal TWK dan pembantahan ketidaktahuan wakil ketua KPK mengenai gagasan ide TWK.

Dengan menggunakan perangkat framing model Robert N.Entman dapat dilihat bahwa media mempunyai sudut pandang masing-masing dalam menyajikan beritanya, peristiwa yang sama dapat menghasilkan pemberitaan yang berbeda sesuai dengan sudut pandang penulisnya.

### Ucapan Terimakasih

Dalam penulisan jurnal ini tentu tidak terlepas dari kendala dan hambatan serta kekurangan, namun berkat pertolongan-Nya dan bimbingan dari banyak pihak yang terkait tulisan ini dapat diselesaikan. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr. Yenrizal, M.Si dan juga Bapak Ahmad Muhaimin, M. Si selaku pembimbing saya yang banyak memberi arahan, serta terimakasih kepada seluruh dosen Ilmu Komunikasi dan staff pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang dan juga terimakasih pada semua pihak yang telah membantu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan.(2017). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eriyanto, (2012). *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologis, Dan Politik Media*. Yogyakarta: LKis.
- Maliana, Inza. (8 Mei 2021). *Deretan Upaya Pelemahan KPK, dari Revisi UU, Kontroversi Firlil Bahuri hingga Tes Alih Status ASN*, diakses pada 30 Juni 2021 dari website [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)
- Mc Quail. Denis.(2011). *Teori Komunikasi Massa Buku 1 Edisi 6*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remadja Rosda Karya
- Prawitasari, Dewi.(2013). Analisis Framing Pemberitaan Kompas.Com Dan Vivanews.Com Pada Peristiwa Runtuhnya Terowongan Tambang Pt Freeport Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume II Nomer 2
- Sobur, Alex.(2012). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semeotik, Analisis Framing*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Ferdiansyah, Berady. (18 Juni 2021). *Nurul Ghufron Bantah Tidak Tahu Penggagas Ide TWK*. Diakses pada 1 Juli 2021 dari website [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com).
- Kamil, Irfan. (17 Juni 2021). *Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi*, diakses pada 30 Juni 2021 dari website [www.kompas.com](http://www.kompas.com)



- Tatang, Guritno. (18 Juni 2021). *Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron dinilai Cuci Tangan*, Diakses pada 30 Juni 2021 dari website [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- Zulfikar, Muhammad. (17 Juni 2021). *KPK Jamin Transparan Soal TWK Selama Menjadi Wewenang Lembaga*. Diakses pada 1 Juni 2021 dari website [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com)